



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Tri Asti Isnariani
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 171038

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 292 m2/168 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOBIL, NISSAN NISSAN X-TRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA ALL NEW VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 153.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.443.000.000**III. HUTANG** Rp. 315.629.410**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.127.370.590

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.